

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Cantika Dea Amanda  
cantikadeaamanda@gmail.com  
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Local financial performance is a level of achievement from the result of financial performance consisting of local budget and the realization; in order to find out local competence in managing finance. This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue and local expenditure on local financial performance in districts/cities of East Java province. Moreover, the research was quantitative. The data collection technique used census sampling. In line with that, there were 114 samples, consisting of 29 districts and 9 cities in East Java during 2019-2021. Furthermore, the data were in form of the result report of the auditing for the Local Financial Statement Report and taken from BPK Representative of East Java. The data analysis technique used multiple linear regression. The result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on local financial performance in districts/cities of East Java province. However, local expenditure had a negative effect on local financial performance in districts/cities of East Java province.*

*Keyword: local-owned source revenue, local expenditure, financial performance*

### ABSTRAK

Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan yang meliputi anggaran daerah dan realisasinya untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan menggunakan metode *sensus sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan yaitu 114 sampel, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur dengan periode tahun 2019 hingga tahun 2021. Data penelitian berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019 hingga tahun 2021 yang diperoleh dari BPK Perwakilan Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, belanja daerah, kinerja keuangan

### PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Liando (2017:5) salah satu indikator kemandirian suatu daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahunnya, oleh karena itu PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah.

Menganalisis tingkat kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah terhadap

APBD yang telah disahkan dan ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, efektif, efisien, dan akuntabel dapat diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018:39).

Analisis kinerja keuangan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran pada APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari komponen-komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh penting terhadap kinerja keuangan, dengan alasan semakin kecil daerah bergantung pada bantuan pemerintah pusat maka semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur sebuah daerah mampu mendanai kegiatannya sendiri yang berasal murni dihasilkan dari daerah tersebut (Darwanis dan Saputra, 2014:184).

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu Belanja Daerah. Pengeluaran pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kegiatan belanja daerah turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah (Antari dan Sedana, 2018). Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Menurut Menyah dan Rufael (2013) belanja yang dilakukan pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, selain itu belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?, (2) Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan Daerah, (2) untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap kinerja Keuangan Daerah.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan hubungan terkait dengan sebuah kontrak perjanjian dimana terdapat satu atau lebih prinsipal sebagai pihak pertama yang melimpahkan wewenang kepada pihak agen untuk kepentingan mereka. Menurut Liando (2017:13) pihak prinsipal sebagai pihak yang membuat tugas dan memberikan perintah atas sebuah kontrak sedangkan pihak agen sebagai pihak yang menerima dan mnejelaskan perintah kontrak sesuai permintaan pihak prinsipal. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam pengembangan kompetensi dan efektivitas pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan APBD yaitu untuk menghindari pemborosan dan penyelewengan dalam melaksanakan kegiatan daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah berupa pengeluaran anggaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana dalam satu tahun anggaran. Tujuan dari adanya belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bersama. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Wibawa *et al* (2017:7) kinerja keuangan daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Indriani dan Sastradipraja, 2014:59).

### **Penelitian Terdahulu**

Pertama, Renas dan Muid (2014) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan periode 2009-2011.

Kedua, Furqon dan Hilda (2015) dengan judul Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa realisasi belanja operasi daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 32 pemerintah provinsi pada tahun 2010-2014.

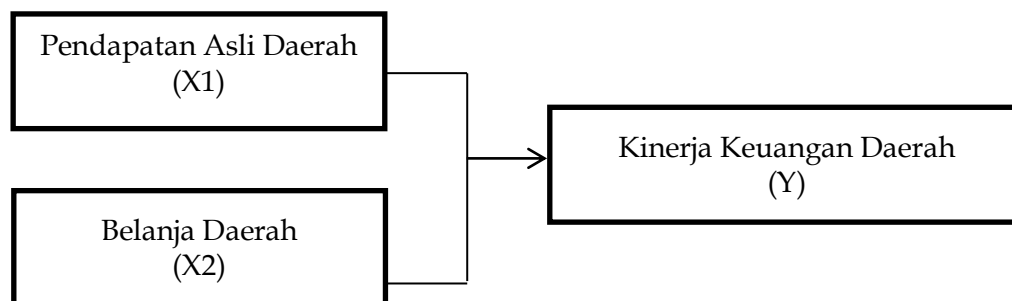
Ketiga, Budianto dan Alexander (2016) dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Daerah. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2015.

Keempat, Antari dan Sedana (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Kelima, Heryanti *et al.*, (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *sensus sampling*. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017.

Keenam, Saputri (2020) dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015-2017.

### Rerangka Pemikiran



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran  
Sumber : Data Sekunder, diolah 2023

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari potensi wilayah daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan PAD berkontribusi terhadap APBD, karena semakin tinggi pendapatan daerah yang dihasilkan maka kinerja keuangan pemerintah daerah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri dan memungkinkan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan kegiatan daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjadi faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong peningkatan investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong

peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dilakukan oleh Heryanti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Antari dan Sedana (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Budianto dan Alexander (2016) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Berdasarkan teori diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan. Alokasi belanja daerah yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Apabila realisasi anggaran belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan yang diterima maka akan mengakibatkan terjadinya defisit pada APBD. Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Kualitas APBD adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, karena dapat mencerminkan bagaimana suatu daerah tersebut membelanjakan anggarannya dengan tepat. Belanja Daerah memiliki standar pelayanan minimal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan seberapa besar anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Saputri (2020) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqon dan Hilda (2015) yang menyatakan bahwa realisasi belanja operasi daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dimana terdapat kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja operasi daerah melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian Renas dan Muid (2014) juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan teori diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:74) Penelitian Kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yang memiliki sifat pengujian hipotesis mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur. Menurut Sugiyono (2014:72), Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 Kabupaten/Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi terhadap populasi ketertarikan (Sekaran dan Bougie, 2017:55). Dalam penelitian ini teknik pengambilan dilakukan secara sensus atau sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel dengan mengambil semua data populasi. Dalam penelitian ini jumlah yang diambil adalah populasi terbatas sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari 38 Kapubapen/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui perantara secara tidak langsung berupa buku, jurnal, maupun arsip-arsip yang telah dipublikasikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang diambil untuk diuji. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019-2021. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang didapat dari jurnal, buku, internet maupun hasil penelitian terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019-2021 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Sedangkan Kinerja Keuangan Daerah menjadi variabel dependen.

#### **Definisi Operasional Variabel**

##### **Pendapatan asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diukur dengan menggunakan satuan rupiah. Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Untuk menghitung rasio pendapatan asli daerah diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai berikut :

$$RDF = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dimana,

PAD = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.

##### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu

(Gorahe *et al*, 2014). Untuk menghitung rasio Belanja Daerah diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Dimana,

Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tak Terduga + Belanja Transfer

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil/*output* kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan alat ukur keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alat ukur kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian yang telah dirumuskan sebagai berikut (Indriani dan Sastradipraja, 2014:60):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasil dalam perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dan semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Jika semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang lain baik berupa bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan metode analisis statistik yang perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda adalah analisis mengenai satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah metode dalam pengelolaan data agar data tersebut dapat diinterpretasikan mengenai suatu kegiatan. Analisis deskriptif digunakan untuk banyak data yang diolah dan dilihat dari nilai minimal dan maksimum data, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau kedua variabel mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Metode untuk menguji normalitas model regresi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan grafik normal *Probability Plot of Regression Standart* (P-Plot), dengan pengujian ini disyaratkan bahwa data normal jika penyebarannya sepanjang 45° garis diagonal dan mengikuti garis diagonal antara 0 dari pertemuan sumbu X dan Y maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. Metode untuk menguji normalitas model regresi juga dapat dilakukan dengan Pendekatan non-parametrik statistik dengan uji

*Kolmogorov Smirnov* (K-S). Menurut Ghozali (2018:30), dasar pengambilan keputusan untuk menentukan pengujian normalitas yaitu data dikatakan normal jika *Asymp. Sig* > 0,05.

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah model regresi antar variabel bebas saling berkorelasi. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Fahmi (2018:30) cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian adalah sebagai berikut: (a) apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai (VIF) < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Dan (b) apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2018:111). Cara untuk menentukan ukuran ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: (a) apabila nilai DW < -2 maka terjadi autokorelasi positif. (b) apabila nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara -2 dan +2 ( $-2 \leq DW \leq +2$ ) maka tidak terjadi autokorelasi. (c) apabila nilai DW > +2 maka terjadi autokorelasi negatif.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ada terjadi ketidaksamaan antara varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ghozali (2018:142) menyatakan cara mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dalam model regresi dapat diketahui melalui pola gambar *Scatterplot*, prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Dasar analisis yang digunakan yaitu: (a) jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang, menyebar, ataupun menyempit), maka dapat dikatakan terjadi adanya heteroskedastisitas. (b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur dan menguji kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang mana dapat menjelaskan ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Selain untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan dependen, analisis ini juga untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berikut ini adalah persamaan model yang digunakan:

$$KKD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BD + e$$

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji kelayakan model ini juga dikenal dengan Uji F. Uji F digunakan untuk mengukur efektifitas model dengan kriteria pengujian tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model, apakah model persamaan yang terbentuk termasuk dalam kriteria cocok atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam uji F



sebagai berikut: (a) jika tingkat signifikan < 0,05 maka, model regresi yang digunakan dapat dikatakan layak. (b) jika tingkat signifikan > 0,05 maka, model regresi yang digunakan dapat dikatakan tidak layak.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Untuk memprediksi variasi variabel dependen agar dapat memberikan semua informasi nilai harus mendekati satu pada variabel independen.

**Uji t**

Pengujian hipotesis secara statistika dilakukan setelah bebas dari uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahui uji t yaitu sebagai berikut: (a) jika signifikan uji t < 0,05 maka h<sub>0</sub> ditolak dan h<sub>a</sub> diterima. (b) Jika signifikan uji t > 0,05 maka h<sub>0</sub> diterima dan h<sub>a</sub> ditolak.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	114	11,12	12,73	11,573	,3081
Belanja Daerah	114	11,91	12,96	12,335	,2140
Kinerja Keuangan Daerah	114	0,94	2,24	1,351	,2324
Valid N (listwise)	114				

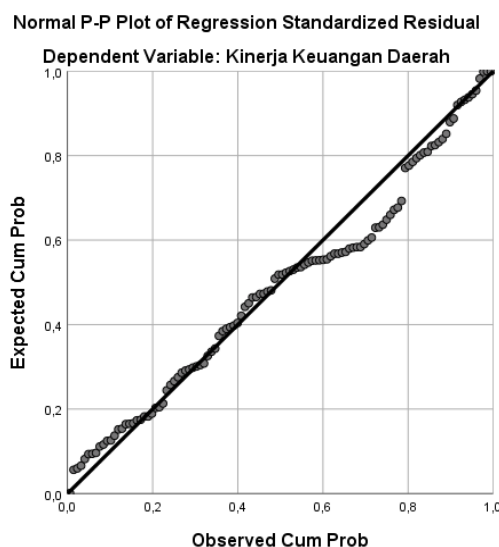
Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) yang diteliti sebanyak 114 data pengamatan. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2019-2021 yang telah diaudit oleh BPK, dengan hasil deskripsi dari masing-masing variabel sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 11,12 selama 3 tahun periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah terendah tersebut dimiliki oleh Kota Pasuruan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maksimum sebesar 12,73 selama 3 tahun periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah tertinggi tersebut dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,573 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,3081. (2) Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 11,91 selama 3 tahun periode penelitian. Belanja Daerah terendah tersebut dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum sebesar 12,96 selama 3 tahun periode penelitian. Belanja Daerah tertinggi tersebut dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) dari Belanja Daerah sebesar 12,335 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,2140. (3) Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,94 selama 3 tahun periode penelitian. Kinerja Keuangan Daerah terendah tersebut dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2021. Sedangkan nilai maksimum sebesar 2,24 selama 3 tahun periode penelitian. Kinerja Keuangan Daerah

tertinggi tersebut dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) dari Kinerja Keuangan Daerah sebesar 1,351 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,2324.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk menguji variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menggunakan pendekatan grafik *probability plot* dan pendekatan *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat dibawah ini:



**Gambar 2**  
**Uji Normalitas Probability Plot (P-Plot)**  
Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa data atau titik-titik menyebar disepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<b>Unstandardized Residual</b>
<b>N</b>		<b>114</b>
<b>Normal Parameters<sup>a,b</sup></b>	Mean	,000000
	Std. Deviation	,04459194
<b>Most Extreme Differences</b>	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,048
<b>Test Statistic</b>		,112
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		,095

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.  
Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan hasil uji kolmogorov-smirnov pada tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai signifikan (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar  $0,095 > 0,05$ . Hal itu menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi (hubungan kuat) yang tinggi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	,316	3,160
Belanja Daerah	,316	3,160

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua hasil perhitungan variabel independen memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10$ . Hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan telah memenuhi uji multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* (sebelumnya). Apabila terdapat korelasi maka diidentifikasi menjadi masalah autokorelasi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 <sup>a</sup>	,963	,963	,04499	1,515

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

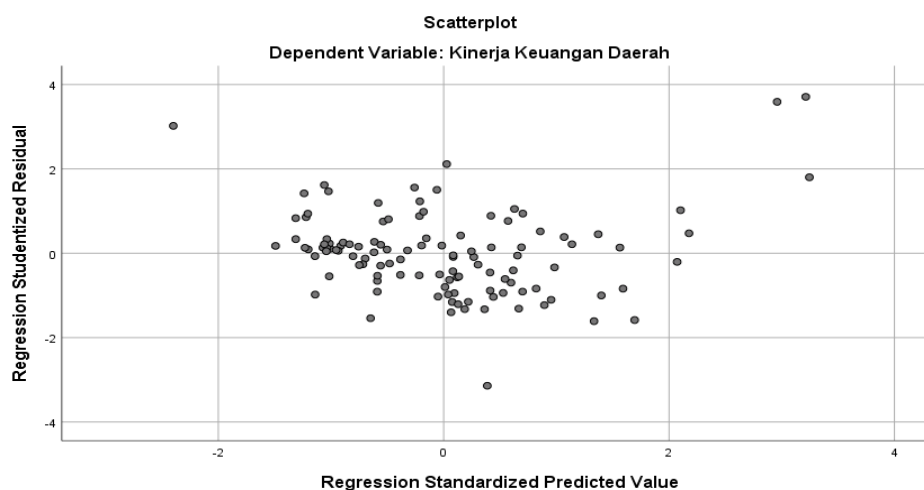
Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai angka *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,515 yang artinya nilai tersebut berada diantara -2 dan + 2, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ada terjadi ketidaksamaan antara varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ghozali (2018:142) menyatakan cara mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dalam model

regresi dapat diketahui melalui pola gambar *Scatterplot*, prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID).



**Gambar 3**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 3, menunjukkan bahwa tidak membentuk pola tertentu, serta titik-titik menyebar secara acak dan menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengukur pengaruh yang ditimbulkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

**Tabel 5**  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,838	,256		3,278	,001
	Pendapatan Asli Daerah	1,241	,024	1,645	50,804	,000
	Belanja Daerah	-1,123	,035	-1,033	-31,913	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKD = 0,838 + 1,241PAD - 1,123BD + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,838 yang artinya jika variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dan belanja daerah dianggap sama dengan 0, maka nilai kinerja keuangan daerah yang dihasilkan sebesar nilai konstanta. (2)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar 1,241 dan nilai koefisien ini bersifat positif, maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan searah dengan kinerja keuangan daerah. Artinya jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, maka kinerja keuangan daerah juga mengalami kenaikan dengan asumsi variabel independen lainnya besarnya dianggap tetap (konstan). (3) Belanja Daerah (BD), nilai koefisien belanja daerah sebesar -1,123 dan nilai koefisien ini bersifat negatif, maka dapat diartikan bahwa belanja daerah berlawanan dengan kinerja keuangan daerah. Artinya setiap kenaikan variabel belanja daerah, maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan daerah dan sebaliknya dengan asumsi variabel independen lainnya besarnya tetap (konstan).

**Pengujian Hipotesis**

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji kelayakan model (Uji F) dilakukan untuk mengukur efektifitas model dengan kriteria pengujian tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model, apakah model persamaan yang terbentuk termasuk dalam kriteria cocok atau tidak.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,876	2	2,938	1451,480	,000 <sup>b</sup>
Residual	,225	111	,002		
Total	6,101	113			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F) pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 1451,480 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti nilai F memberikan hasil yang signifikan maka model regresi yang digunakan untuk penelitian ini dinyatakan layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 <sup>a</sup>	,963	,963	,04499	1,515

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,963 atau 96,3% yang artinya pendapatan asli daerah dan belanja daerah mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 96,3% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, sedangkan 3,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

### Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,838	,256		
	Pendapatan Asli Daerah	1,241	,024	1,645	50,804
	Belanja Daerah	-1,123	,035	-1,033	-31,913

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis (uji t) pada tabel 8, menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 50,804 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya Pendapatan Asli Daerah dinyatakan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dengan demikian hipotesis pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah diterima. (2) Belanja Daerah memiliki nilai t hitung sebesar -31,913 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya Belanja Daerah dinyatakan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis kedua yaitu Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 50,804 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 . Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai positif dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan semakin tinggi pula perencanaan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah yang disesuaikan dengan kepentingan daerah tersebut. Meningkatnya pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya sendiri, sehingga hal itu akan tercerminkan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah telah mandiri dan tidak lagi bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Febriansyah (2015), Budiando dan Alexander (2016), serta penelitian Saputri (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio

kemandirian. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Antari dan Sedana (2018) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis Belanja Daerah memiliki  $t$  hitung sebesar  $-31,913$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah memiliki nilai negatif dan nilai signifikan kurang dari  $0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yang artinya Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya alokasi belanja daerah, maka semakin menurunnya kinerja keuangan daerah. Hal ini terjadi karena terdapat kecenderungan pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja operasi daerah melebihi belanja lainnya, serta mengindikasikan bahwa tidak semua belanja modal mampu menghasilkan sumber keuangan secara langsung bagi daerah. Terdapat beberapa penyebab tidak tercapainya target kinerja keuangan daerah yang mandiri, yaitu diantaranya dari beberapa Kabupaten/Kota tidak melakukan perencanaan kebutuhan secara matang, pelaksanaan kegiatan fisik seringkali dilakukan pada akhir tahun, dan masih terdapat kesalahan pos penganggaran sehingga tidak bisa terealisasi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Furqon dan Hilda (2015), Antari dan Sedana (2018), serta penelitian Saputri (2020) yang menyatakan bahwa belanja operasi, belanja modal, dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Renas dan Muid (2014), menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel dari penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2019-2021. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang artinya semakin meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian kinerja keuangan daerahnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pembangunan, perkembangan, dan pelayanan publik. (2) Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang artinya semakin tingginya alokasi belanja daerah maka akan diikuti dengan menurunnya kinerja keuangan daerah.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut: (1) Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah belum maksimal oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Dan diharapkan pemerintah daerah tidak berhenti untuk terus bersosialisasi mengenai kesadaran pembayaran pajak dan retribusi kepada masyarakat. (2) Mengenai belanja daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas publik. (3) Untuk beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja Keuangan terendah, diharapkan untuk lebih melakukan perencanaan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan yang riil. (4) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pembiayaan, ukuran

pemerintah, pertumbuhan ekonomi. Karena dari hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebanyak 3,7% kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di penelitian ini. (5) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak periode dan sampel lebih dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N.P.G.S dan I.B.P Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen Unud* 7(2): 1080-1110.
- Budianto dan S.W. Alexander. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Journal Magister Akuntansi* 5(3): 30-38.
- Darwanis dan R. Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1(2): 183-199.
- Fahmi, I. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek*. Alfabeta. Bandung.
- Furqon, A. C dan R. Hilda. 2015. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Pendapatan & Belanja Daerah sebagai Pemediiasi (Tudi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*. 24-27 Agustus 2016: 1-32.
- Gorahe, I.A.M., V. Masinambow, dan D. Engka. 2014. Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 14(3): 1-12.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Sembilan. Cetakan Sembilan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamid, A. A. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas* 1(4): 38-51.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, dan B. Suryono. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3(1): 98-116.
- Indriani, D dan U. Sastradipraja. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Cirebon. *Portofolio* 11(1): 55-76.
- Liando, I. I. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Menyah, Kojo, dan Y. W. Rufael. 2013. Government Expenditure and Economic Growth: The Ethiopian Experience, 1950-2007. *The Journal of Developing Areas* 47(1): 263-280.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Renas dan D. Muid. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting* 4(3): 1-15.



- Saputri. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(1).
- Sekaran, U dan R. Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Buku Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D Cetakan 20*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wibawa, D.T., Hasbudin., Ruslin., dan T. Dharmawati. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Opini Wajar dengan Opini Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*. 23-30 September: 1-36.